



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : UND/2178/DKM.00/80-82/11/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Undangan Kegiatan Seminar Daring Internasional 2025

21 November 2025

**Yth. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)
(Daftar Terlampir)
di Tempat**

Sebagai lembaga yang mengemban fungsi pendidikan, kampanye, dan sosialisasi antikorupsi kepada seluruh masyarakat, termasuk perguruan tinggi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap perguruan tinggi dapat membentuk individu-individu yang berintegritas untuk menjalankan tugas dan peran di masyarakat.

Dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2025, Direktorat Jejaring Pendidikan KPK bermaksud menyelenggarakan **seminar daring internasional** dengan tema **“Tata Kelola dan Integritas di Sektor Kesehatan: Menjembatani Teori, Kebijakan, dan Praktik”**, yang akan diselenggarakan pada:

hari/tanggal : Selasa, 2 Desember 2025
waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB
media : Zoom Meeting
tautan : <https://bit.ly/IntegritasSektorKesehatan>

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Ibu/Bapak untuk meneruskan informasi mengenai kegiatan terlampir kepada perguruan tinggi kesehatan dan perguruan tinggi lain yang memiliki pendidikan kesehatan yang dibawah naungan LLDikti. Kami berharap kehadiran dan partisipasi sivitas akademika, khususnya bidang kesehatan, pada kegiatan seminar daring internasional tersebut.

Untuk informasi dan koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Fungsional Direktorat Jejaring Pendidikan KPK, Sdri. Siti Patimah pada nomor ponsel 0877-4440-9224 atau surel siti.patimah@kpk.go.id, maupun melalui Sdr. Masagung Dewanto pada nomor ponsel 0812-1988-8819 atau surel masagung.dewanto@kpk.go.id.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Ibu/Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Pimpinan
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana

Tembusan:

1. Pimpinan KPK
2. Inspektur KPK

Lampiran Surat 1

Nomor : UND/2178/DKM.00/80-82/11/2025

Tanggal : 21 November 2025

Daftar Kepala LLDikti

No	Lembaga LLDikti
1	LLDikti Wilayah I Sumatera Utara
2	LLDikti Wilayah II Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka-Belitung
3	LLDikti Wilayah III Jakarta
4	LLDikti Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
5	LLDikti Wilayah V Yogyakarta
6	LLDikti Wilayah VI Jawa Tengah
7	LLDikti Wilayah VII Jawa Timur
8	LLDikti Wilayah VIII Bali dan Nusa Tenggara Barat
9	LLDikti Wilayah IX Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
10	LLDikti Wilayah X Sumatera Barat dan Jambi
11	LLDikti Wilayah XI Kalimantan
12	LLDikti Wilayah XII Ambon
13	LLDikti Wilayah XIII Aceh
14	LLDikti Wilayah XIV Papua dan Papua Barat
15	LLDikti Wilayah XV Nusa Tenggara Timur
16	LLDikti Wilayah XVI Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah
17	LLDikti Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Webinar Internasional:

Tata Kelola dan Integritas di Sektor Kesehatan: Menjembatani Teori, Kebijakan, dan Praktik

1. Latar belakang

Sektor kesehatan merupakan pilar penting untuk memastikan kualitas hidup masyarakat. Secara global, sektor ini merupakan salah satu bidang dengan belanja publik terbesar, dengan estimasi lebih dari 8,5 triliun dolar AS per tahun (sekitar 10% dari PDB dunia). Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 7-10% dari total pengeluaran kesehatan di seluruh dunia hilang karena korupsi dan inefisiensi, setara dengan lebih dari US\$500 miliar per tahun. Kerugian ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap layanan penting, terutama di negara berkembang yang sumber daya kesehatannya sudah terbatas.

Di Indonesia, sektor kesehatan secara konsisten termasuk dalam lima besar sektor yang paling rawan korupsi, bersama dengan sektor infrastruktur dan pendidikan. Berdasarkan data Direktorat Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), antara tahun 2010 hingga 2024, setidaknya terdapat 60 kasus korupsi di sektor kesehatan yang ditangani oleh penegak hukum, dengan perkiraan kerugian negara lebih dari Rp 2,6 triliun. Kajian KPK menemukan berbagai skema korupsi di bidang kesehatan, antara lain korupsi pada pengadaan, *mark-up* dalam distribusi obat dan alat kesehatan, manipulasi klaim asuransi kesehatan, dan praktik gratifikasi.

Melihat berbagai risiko tersebut, penguatan integritas, tata kelola, dan upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan menjadi hal yang mendesak. Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan akademisi dan tenaga kesehatan mengenai tantangan serta strategi pencegahan korupsi, dengan mempelajari pengalaman dari perspektif internasional maupun nasional.

2. Tujuan

- Meningkatkan kesadaran dan memperluas pemahaman tentang korupsi di sektor kesehatan dari perspektif global dan nasional.
- Berbagi praktik baik terkait strategi penegakan dan pencegahan dari pemerintah, KPK, dan akademisi.
- Mendorong partisipasi aktif akademisi, mahasiswa, dan profesional kesehatan dalam mempromosikan integritas dan tata kelola yang baik di bidang kesehatan.
- Membangun jaringan berbagi pengetahuan yang lebih kuat antara KPK, Kementerian Kesehatan, para ahli internasional, dan komunitas akademik.

3. Target Peserta

- Dosen, peneliti, dan mahasiswa Politeknik Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes), di seluruh Indonesia.
- Dosen, peneliti, dan mahasiswa dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan lainnya dari perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
- Civitas akademika perguruan tinggi.
- Masyarakat umum yang tertarik dengan isu antikorupsi khususnya di bidang kesehatan.
- Target peserta: 700+ peserta hadir secara daring.

4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Format : Seminar daring internasional (webinar).
- Bahasa : Bilingual (Inggris–Indonesia) dengan interpretasi simultan.
- Durasi : Dua jam.
- Platform : Zoom Webinar.
- Penyelenggara : KPK bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.

5. Output yang Diharapkan

- Peningkatan kesadaran dan pengetahuan di antara peserta tentang risiko korupsi dan kecurangan di bidang kesehatan.
- Wawasan bersama tentang strategi penegakan dan pencegahan serta praktik baik secara global.
- Memperkuat kolaborasi antara KPK, Kementerian Kesehatan, dan akademisi dalam mempromosikan integritas.

6. Hasil yang Diharapkan

- Kesadaran yang lebih tinggi bagi peserta terhadap tantangan sistemik dan risiko korupsi di sektor kesehatan.
- Mendorong perguruan tinggi dan politeknik untuk mengintegrasikan perspektif antikorupsi ke dalam pendidikan terkait kesehatan.
- Sinergi antara pemerintah, lembaga antikorupsi, dan akademisi dalam membangun strategi pencegahan kolaboratif sistem kesehatan.

7. Rancangan Agenda

Tema : Tata Kelola dan Integritas di Sektor Kesehatan:
Menjembatani Teori, Kebijakan, dan Praktik
Hari, Tanggal : Selasa, 2 Desember 2025
Waktu : 09.00 s.d. 11.00 WIB (GMT+7)
Format : Daring (Zoom Webinar)
Moderator : Spesialis Jejaring Pendidikan, KPK

Susunan Acara:

Waktu	Agenda	Pengisi
09.00 – 09.05	Pembukaan	Moderator
09.05 – 09.15	<i>Keynote Speech:</i> Penguatan Integritas dan Tata Kelola di Sektor Kesehatan	Ketua KPK
09.15 – 09.40	Penguatan Sistem Integritas di Sektor Kesehatan: Strategi Pemerintah dalam Pencegahan Korupsi	Inspektur Jenderal, Kementerian Kesehatan
09.45 – 10.10	Memerangi Korupsi di Sektor Kesehatan: Pelajaran dari Pengalaman KPK	Plt. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK
10.10 – 10.35	Praktik Baik Pencegahan Korupsi di Sektor Kesehatan: Pembelajaran dari Australia	PhD Candidate The University of New South Wales, Australia
10.35 - 11.00	Membangun Kepemimpinan Etis dan Integritas dalam Pendidikan dan Praktik Kesehatan: Perspektif Internasional	U4 Anti-Corruption Resource Center*
11.00 – 11:30	Diskusi, Tanya Jawab, dan Penutup	Moderator & seluruh pembicara

* Pembicara tentative dan masih dalam konfirmasi.

Referensi:

- Organisasi Kesehatan Dunia (2023). 'Laporan Pengeluaran Kesehatan Global 2023.' Jenewa: WHO.
- OECD (2022). 'Mengatasi Risiko Penipuan dan Korupsi di Sektor Perawatan Kesehatan.' Paris: Penerbitan OECD.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia, Direktorat Pemantauan (2024). 'Data Kasus Korupsi di Bidang Kesehatan.' Jakarta: KPK.
- Transparansi Internasional (2022). 'Indeks Persepsi Korupsi.' Berlin: Transparansi Internasional.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi,



Dokumen ini ditandatangani secara digital
Wawan Wardiana